



"Tema: 5 (kewirausahaan, koperasi dan UMKM)"

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESANTREN DALAM KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI

Oleh

**Adhi Iman Sulaiman, Masrukin, & Bambang
Suswanto FISIP Universitas Jenderal Soedirman
adhi.2005unsoed@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi di Desa Kujang, Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Menggunakan metode kualitatif penelitian *Participatory Action Research* (PAR), pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan *Focus Group Discussion*. Informan penelitian secara purposive yaitu 25 orang dari kelompok kewirausahaan dan Koperasi. Analisis data PAR yaitu triangulasi, mencari keragaman dan investigasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat yaitu (1) Mengidentifikasi dan analisis masalah, potensi sumber daya manusia, alam dan ekonomi masyarakat untuk merencanakan program pemberdayaan, (2) Berhasil menumbuhkan semangat dan kebersamaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan serta Koperasi, (3) Melaksanakan program penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, (4) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan, perluasan akses pasar dan kemitraan, (5) Menjadi proses rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat dari traumatik, dan stigma negatif terhadap pesantren.

Kata kunci: *kewirausahaan, Koperasi, masyarakat desa, pemberdayaan, pesantren*

ABSTRACT

The study aims to analyze of community empowerment in entrepreneurs and cooperative institutions in Kujang Village, Cikoneng District, Ciamis Regency. Used qualitative research methods of Participatory Action Research (PAR). Data was collected through interviews, documentation, observation, and Focus Group Discussion. Informants have been purposive selected i.e. 25 people from the entrepreneurship group and cooperatives. PAR data analysis is triangulation, seeking diversity and investigation with society. The results showed the implementation of community empowerment model: (1) Identify and analyze the problem, potential of human, natural and economic resources of communities to plan empowerment programs, (2) The Managed to foster a spirit and togetherness to improve knowledge and skills of entrepreneurship and cooperatives, (3) Execute a program extension, training and mentoring, (4) Monitoring and evaluation in the form of assistance, expansion of market access and partnership, (5) The rehabilitation process of social and economic from the traumatic, and negative stigma against pesantren.

Key words: boarding school, cooperatives, empowerment, entrepreneurship, rural community.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers
"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX" 19-
20 November 2019
Purwokerto



PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat menjadi konsep dan program utama dalam melakukan pembangunan desa siring dengan tantangan reformasi, demokratisasi dan otonomi desa. Otonomi desa diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43. Pada Pasal 1 (8) Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pada ayat (3) pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Konsep otonomi desa dalam undang-undang desa merupakan perwujudan konsep pembangunan partisipatif yang diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi kajian dan program yang terus digalakan. Karena desa merupakan pondasi pembangunan yang menentukan kekuatan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa, karena desa adalah representasi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui masalah, potensi, kebutuhan dan prospek masyarakat desa. Adi (2013) menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa' karena disadari masih cukup banyak desa yang belum dikembangkan secara optimal. Rangkuti (2011) bahwa paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran dimana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*) yang dikenal dengan pembangunan manusia (*people centered development*)' pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource based development*) dan pembangunan kelembagaan (*intitutional development*).

Berdasarkan semangat, dukungan dan keseriusan membangun desa tersebut, diharapkan desa bukan hanya kampung halaman yang dicintai dan dirindukan oleh warganya yang marantau di luar kota atau meninggalkan desa. Namun desa bisa menjadi wilayah yang ramah, nyaman, menyenangkan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tidak ditinggalkan dan diabaikan pembangunannya.

Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan desa khususnya dalam melaksanakan pemberdayaan diantaranya (1) Masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk membuat program pemberdayaan. (2) Proses pembuatan program pemberdayaan masih didominasi oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu seperti pemerintah desa dan aktor tokoh masyarakat serta kelembagaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa. (3) Peranan perempuan dalam proses pembuatan program pemberdayaan masih terbatas baik keterlibatannya



masih sedikit, keterbatasan akses informasi dan kesempatan. (4) Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak komprehensif, berkesinambungan, dan cenderung program jangka pendek, sehingga seringkali masyarakat mendapatkan penyuluhan dan pelatihan, tetapi kurang mendapat pendampingan, monitoring dan evaluasi. (5) Pelaksanaan pemberdayaan masih bersifat parsial dan kurang sinergitas antara pihak pelaku pemberdayaan seperti pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi, sehingga program pemberdayaan berjalan sendiri-sendiri dan kurang saling mendukung. (6) Pemberdayaan kurang mampu membangun dan memperluas kemitraan dan kemandirian, sehingga masyarakat masih ketergantungan, kurang berkembangnya kelembagaan, dan pemasaran produk. (7) Pembangunan di desa dengan dukungan anggaran yang cukup besar dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur daripada program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan motivasi, kemampuan, kelembagaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Priyono, 1996; Sumodiningrat et al. 1999; Suharto 2005; Nurman & Ratnawulan, 2006; Hubeis, 2010; Harun & Ardianto, 2011; Handoko et al. 2014, Sulaiman et al. 2016a; Sulaiman, et al. 2016b).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu merancang program pemberdayaan yang dapat memberikan kesempatan lebih terbuka bagi masyarakat secara partisipatif, kolaboratif, dan komprehensif mulai dari perencanaan perumusan program, pelaksanaan, laporan dan evaluasi. Masyarakat bukan lagi sebagai objek pemberdayaan pemberdayaan, tetapi sebagai pelaku (subjek) pembangunan. Pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif perlu mempertimbangkan potensi desa mulai dari sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya budaya yang telah menjadi bagian yang terintegrasi untuk memajukan desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Potensi sumber daya masyarakat dan desa menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan untuk dapat melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah menjadi keunikan, kekhasan dan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat desa yaitu karifan local (local wisdom). Sebagaimana menurut Widodo dan Suradi (2011) organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perlu diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan masyarakat sebagai keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan, khususnya bagi pembangunan kesejahteraan sosial. Begitupun Mardikanto & Soebiato (2012) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai: (1) Proses perubahan dan memerlukan inovasi berupa ide tau gagasan, produk, metode, peralatan dan teknologi dengan kajian serta pengembangan kebiasaan, nilai, tradisi pada kearifan lokal (*indigenous technology*). (2) Proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan (*sustainable development*) jangka panjang. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi, sebagaimana



dalam gambar berikut ini. Christens (2012) menegaskan bahwa pembangunan partisipatif mensyaratkan adanya pemberdayaan yang memperhatikan aspek psikologi masyarakat seperti semangat, harapan dan pengakuan eksistensi yang harus diraih untuk mengembangkan potensi dan partisipasi masyarakat. Wirawan dan Nurudin (2013) menjelaskan pentingnya mengkaji persoalan yang selalu muncul yaitu faktor sosial budaya dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat sebagai modal pembangunan. Menjaga dan melestarikan lingkungan fisik, sosial, pengetahuan dan teknologi lokal dengan "keuletan" adalah kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan perubahan menjadi potensi penting dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sampai keberhasilan dalam meningkatkan motivasi, kemampuan, dan produktivitas, tetapi memerlukan pendampingan untuk menjalin serta memperluas kemitraan. Menurut Popple dan Quinney (2002) tujuan strategis dalam pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu mengembangkan kemitraan yang efektif dan berpartisipasi dalam kelembagaan sebagai pembelajaran melalui dukungan pemerintah untuk terlibat dalam rekayasa sosial di masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Rinawati (2006) menyatakan dalam otonomi daerah, pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yaitu adanya pembangunan partisipatif yang berlandaskan pada partisipasi yang aktif dari lapisan masyarakat terendah (di desa) mulai dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan), sumber dana dan evaluasi. Syahyuti (2006) menjelaskan bahwa konsep pembangunan partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan. Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara dinamis, aktual dan potensial dengan berbasis kepada program daerah, regional, dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pemberdayaan masyarakat pesantren dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi yang berlokasi di Desa Kujang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif *Participatory Action Research* (PAR) yaitu penelitian yang melibatkan partisipasi pihak yang berkaitan secara aktif dan bersama-sama melakukan tindakan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah yang dialami berdasarkan pertimbangan kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya (Reason & Bradbury, 2008).



Lokasi penelitian di Desa Kujang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi langsung, dokumentasi dan *Focus Group Discussion*, dengan penentuan subjek penelitian (informan) melalui purposive yaitu 25 orang sebagai *community worker* yang berasal dari pengurus kelompok kewirausahaan dan Koperasi, para praktisi serta penggiat pemberdayaan masyarakat desa. Analisis data PAR yaitu: (1) Melakukan prinsip triangulasi yang digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin. (2) Mencari keragaman baik persamaan dan perbedaan. (3) Investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal (Syahyuti, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

Penulis melakukan riset lanjutan dengan menggunakan metode penelitian Participatory Action Research (PAR) yang relevan dalam melakukan penelitian dan pelaksanaan pemberdayaan untuk pengembangan kewirausahaan dan Koperasi masyarakat desa. Adapun proses tahapan penelitian yang penting untuk mengkaji manajemen pemberdayaan sebagai berikut yaitu: (1) Studi pendahuluan dengan melakukan kajian literatur dari hasil penelitian akademis, jurnal ilmiah, dan media massa baik cetak maupun elektronik. (2) Melakukan pembukaan akses ke lokasi penelitian untuk ijin penelitian, melakukan perkenalan, pendekatan dan observasi, sekaligus melakukan wawancara dan dokumentasi. (3) Melakukan pembahasan hasil tahapan studi literatur dan pembukaan akses dengan tim penelitian, praktisi, penggiat dan pelaku pemberdayaan masyarakat. Hasil diskusi yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, fokus, tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian yang dipergunakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat proses penelitian pemberdayaan masyarakat.

Studi pendahuluan dan pembukaan akses penelitian sangat penting dan menentukan dalam proses penelitian partisipatif riset aksi untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat desa yaitu adanya penerimaan, dukungan dan keterlibatan masyarakat desa. Proses selanjutnya menjalin kedekatan dan terus memelihara hubungan supaya dekat dan tidak ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti sebagai subjek penelitian. Kedekatan dan penerimaan dari masyarakat sebagai subjek pemberdayaan akan mendukung proses penelitian dan pelaksanaan hasil penelitian dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan sebagai tahapan manajemen pemberdayaan masyarakat. Manajemen pemberdayaan dapat membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat berupa kelompok kewirausahaan dan Koperasi. Manajemen pemberdayaan masyarakat dirancang secara dialogis dan partisipatif antara peneliti dengan masyarakat dan stakeholder, sehingga dapat dibuat program pemberdayaan yang disepakati bersama sesuai aspirasi dan potensi masyarakat desa.



Hasil tersebut merupakan proses penelitian PAR yang relevan untuk mengkonstruksi lagi hasil riset dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Menurut Baum et al. (2006) PAR berusaha untuk memahami dan memperbaiki realitas yang dialami masyarakat dengan melakukan penelitian reflektif dan pemberdayaan antara peneliti dengan masyarakat yang berhubungan langsung dengan tindakan, berdasarkan pemahaman sejarah dan budaya lokal, sehingga mampu mengontrol kehidupan masyarakat itu sendiri. McIntyre (2008) menegaskan bahwa PAR merupakan metode penelitian yang ideal bagi peneliti yang berkomitmen untuk mengembangkan program penelitian bersama dengan masyarakat sebagai pelaku atau subjek penelitian. Pelaksanaan metode PAR dalam pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk menyusun prioritas kebutuhan dan pemetaan warga sebagai bentuk pembelajaran bersama.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelembagaan Kewirausahaan dan Koperasi

Sebagaimana dalam proses penelitian pemberdayaan masyarakat yang mengawali tahapan studi pendahuluan, pembukaan akses dan pendekatan terhadap masyarakat untuk membangun dukungan dan keterbukaan masyarakat dengan dialog serta terbuka tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat direncanakan, dibuat program dan dilaksanakan berdasarkan identifikasi dan analisis masalah, potensi dan prospek di masyarakat baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan dan sumber daya sosial budaya.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Desa Pasuruhan merasa traumatik dengan peristiwa tiga kali penangkapan yang diduga teroris, adanya stigma negatif dan ketidakharmonisan antara masyarakat yang menghindari berinteraksi dengan keluarga yang ada kaitannya dengan pelaku kasus penangkapan. Namun proses mediasi yang didukung dan dibantu pemerintah desa melalui dialog sarasehan dengan mengundang kedua belah pihak, menghasilkan kesefahaman dan kesepakatan bersama yaitu harapan dan keinginan bersama untuk dapat membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi sesuai potensi serta minat melalui program pemberdayaan masyarakat. Membutuhkan induk usaha bersama dalam bentuk Koperasi yang menyediakan kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obat pertanian serta peralatan pertanian. Kemudian memperkuat kewirausahaan usaha mikro yang telah berjalan yaitu kelompok tani, kelompok ternak Ikan Lele, Itik dan budidaya Azolla. Windiasih (2002) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan juga dapat dilakukan pada masyarakat binaan yang memiliki karakteristik khusus sebagai komunitas yang termarginalkan dan memiliki rasa traumatik, dengan cara melakukan pendekatan, pendampingan dan memberikan ruang dialog untuk mengemukakan masalah, potensi dan program pemberdayaan yang diharapkan.

Menurut Ardiana et al. (2010) pengembangan kompetensi sumber daya manusia Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja wirausaha



yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global. Peningkatan sumber daya manusia pengurus Koperasi juga sangat diperlukan untuk perkembangan UKM dalam pinjaman modal, memfasilitasi jaringan bisnis, pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produk UKM. Nurbudiyani (2013) menyatakan manajemen kewirausahaan dan Koperasi sebagai model untuk menumbuhkan pembelajaran dan keterampilan kewirausahaan.

Hasil dari dialog sarasehan tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan kewirausahaan dan Koperasi. Tahap selanjutnya yaitu pemantapan rencana program pemberdayaan sebagai hasil kesepakatan masyarakat, yang melibatkan para praktisi, penggiat atau pemerhati pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk manajemen pemberdayaan masyarakat untuk merancang perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dan komprehensif berdasarkan kesepakatan bersama hasil dialog sarasehan (musyawarah) masyarakat. Dalam manajemen pemberdayaan proses komunikasi yang dialogis dan partisipatif dalam sarasehan atau musyawarah menjadi penentu untuk keberlanjutan kegiatan, karena masyarakat harus terbuka untuk beraspirasi, mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Menurut Tattersall (2015), Sahakian dan Dunand (2014) bahwa ekonomi sosial dan solidaritas di masyarakat berpotensi menjadi ekonomi keberlanjutan dengan berpartisipasi untuk pengembangan dan mengelola masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama untuk kepentingan publik serta meningkatkan kapasitas pemimpin masyarakat untuk melaksanakan keputusan bersama yang mempersatukan masyarakat. Gruidla dan Hustedde (2015) menegaskan pentingnya musyawarah yang dialogis, partisipatif, representatif dan egaliter merupakan tujuan mendasar dalam pengembangan masyarakat untuk membuat keputusan yang bermanfaat dan adil.

Pemberdayaan masyarakat tahap berikutnya yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian tentang kelembagaan koperasi, manajemen kepengurusan, administrasi, keanggotaan, permodalan, keuangan, dan pembagian sisa hasil usaha, serta mekanisme rapat. Akhirnya Ponpes Nurussalam sudah dapat mengembangkan potensi ekonomi berupa kewirausahaan Koperasi Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah binaan dan kemitraan Koperasi Syariah Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat) sebagai tim perintis yang mengawali pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan mengajak masyarakat dan kelompok kewirausahaan untuk menjadi anggota dan pengurus. Kemudian mengagendakan rapat pengurus dan anggota untuk memilih kepengurusan yang resmi selama satu periode. Pembentukan Koperasi sangat cocok dengan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih memiliki sifat gotong royong, solidaritas dan kepedulian yang tinggi. Sudiarditha (2008) menjelaskan bahwa Koperasi memiliki dua unsur yaitu ekonomi dan sosial yang memperjuangkan pemenuhan kebutuhan anggotanya.



Karena Koperasi itu bisnis tetapi dengan jiwa kekeluargaan yang tinggi, untung dan rugi ditanggung secara bersama-sama. Menurut Hutasuht (2001) koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan semangat masyarakatnya, yaitu azas kekeluargaan dan kewirausahaan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Gemina et al. (2013) menyatakan manajemen keanggotaan dan partisipasi anggota secara bersama maupun secara parsial berpengaruh terhadap keunggulan dan daya saing.

Penguatan kelembagaan Koperasi selain diberikan kegiatan pendampingan, juga melakukan studi banding kepada Koperasi yang sudah maju untuk meningkatkan motivasi, inspirasi dan akses jaringan kemitraan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi melalui observasi, dialog secara non formal dan musyawarah pengurus serta anggota Koperasi. Indikator monitoring dan evaluasi yaitu kelengkapan administrasi, catatan dan laporan keuangan, sirkulasi penjualan, banyaknya asset modal dan keuntungan, catatan dan kelancaran pinjaman, kemudian jumlah, keaktifan dan administrasi keanggotaan, dan rencana pengembangan Koperasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi yaitu perlu menggabungkan kelompok usaha ekonomi sebagai kewirausahaan yang sudah ada di masyarakat untuk menjadi anggota, pengurus dan unit usaha yang berada dalam struktur Koperasi.

Anantanyu (2011) menjelaskan pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi di desa yaitu dengan manajemen keorganisasian untuk peningkatan kemampuan sumber daya, kemampuan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan. Manajemen penguatan kelembagaan dengan pemantapan terhadap visi kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan kerjasama antar kelembagaan. Menurut Christens (2012) proses pemberdayaan untuk mendukung pengembangan komunitas terhadap pengelolaan kekuasaan lokal dan pembuatan keputusan bersama di masyarakat. Begitupun Pama dan Ganesha (2014) penguatan pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan berbagai usaha untuk menopang aktivitas kehidupan pembangunan, maka diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani.

Penguatan dan pengembangan Koperasi dan kewirausahaan masyarakat dilaksanakan dengan membuka akses kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan KUKM dan Dinas Ketahanan Pangan serta Penyuluhan untuk berdialog tentang hasil penelitian. Tindak lanjut dari dialog tersebut, pihak pemerintah daerah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang sudah dibuat dan dilaksanakan dengan cara memberikan tambahan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap Ponpes Nurussalam sudah dapat mengembangkan potensi ekonomi berupa lembaga Koperasi Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah binaan dan kemitraan Koperasi Syariah Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat). Widayanti menyatakan (2012) program pemberdayaan memiliki tujuan untuk menyelesaikan dampak masalah



sosial, Namun membutuhkan peran semua pihak seperti pemerintah melalui kebijakannya, dunia usaha dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan organisasi masyarakat dengan aktivitasnya. Pemberdayaan khususnya dalam program CSR dapat berhasil jika terdapat kerjasama (kemitraan) khususnya pihak pemerintah berupa dukungan kebijakan dan memfasilitasi kebutuhan dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Menurut Hasim dan Remiswal (2009) pembangunan partisipatif cirinya melaksanakan: (1) Pemberdayaan (*empowering*) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, (2) Keterbukaan (*transparency*) dalam setiap proses dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bisa diakses seluruh masyarakat, (3) Akuntabilitas (*accountability*) setiap proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, (4) Keberlanjutan (*sustainability*) proses pembangunan tersebut harus berjalan secara berkelanjutan, (5) Partisipasi (*participation*) yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan

Manajemen pemberdayaan masyarakat tahap berikutnya yaitu memberikan penyuluhan dan rekomendasi pembentukan dan pengembangan kewirausahaan yang sudah ada di masyarakat seperti para petani, peternak ikan Lele, Itik, dan budidaya Azolla. Produknya sudah dibeli oleh pengepul dan mampu dijual di pasar-pasar daerah Ciamis. Namun kewirausahaan tersebut masih terpisah atau belum dalam bentuk kelompok usaha, belum mendapat penyuluhan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas serta kuantitas produksi.

Manajemen pemberdayaan untuk kewirausahaan diawali dengan cara membuka forum dialog sarasehan yang melibatkan para wirausaha yang ada di Desa Pasuruhan dan pengurus Koperasi dengan dukungan pemerintah desa. Tujuan kegiatan dialog sarasehan untuk merancang dan melaksanakan program pemberdayaan berdasarkan identifikasi permasalahan yang selama ini dihadapi, menganalisis potensi dan prospek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta perluasan jaringan pemasaran. Menurut Samah dan Aref (2009) pemberdayaan merupakan proses partisipasi secara berkelanjutan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dalam mengatasi masalah dan kebutuhan bersama, membawa perubahan kehidupan masyarakat, serta dapat mengendalikan kepentingan secara kolektif baik sosial, ekonomi dan politik. Nurcholis et al. (2009) menyatakan suatu model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi, perumusan, dan pencarian alternatif dari masalah. Kemudian menyusun agenda pemecahan dan proses pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi. Begitu juga menurut Mikkelsen (2011) bahwa pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program dengan pertimbangan persepsi, pola



sikap, pola pikir dan nilai-nilai serta ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat kemudian umpan balik dari kegiatan pembangunan.

Tahap selanjutnya kegiatan musyawarah dengan para wirausaha untuk membentuk kelompok sesuai kesamaan bidang usaha, tujuannya untuk dapat saling mendukung, bekerjasama, memperkuat dan mengembangkan usahanya yaitu Ponpes Nurussalam sudah dapat mengembangkan potensi ekonomi berupa lembaga Koperasi Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah binaan dan kemitraan Koperasi Syariah Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat) Sebagaimana menurut Riosa dan Lachapelle (2015) pengembangan masyarakat merupakan komitmen terhadap persamaan atau kesetaraan dalam berpendapat dan berpartisipasi melalui kesepakatan bersama yang dialogis dan adil. Nugrianti dan Zulkarnaini (2013) mejelaskan arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang "pro poor" dengan kebijakan pembangunan yang lebih aktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kegiatan selanjutnya melakukan survei dan observasi ke tempat wirausaha masyarakat untuk melakukan penilaian atau analisis kondisi, situasi, potensi dan prospek usaha. Hasil dari musyawarah, survei dan observasi dilakukan kajian dengan para praktisi dan penggiat pemberdayaan untuk merancang perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi proram pemberdayaan kewirausahaan. Pelaksanaan pemberdayaan diawali dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan untuk memotivasi, menyatukan visi dan misi. Kemudian menambah pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan anggota, proses produksi yang lebih efektif dan efisien, pengemasan dan labeling produk, strategi promosi serta pemasaran. Proses pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian, peternakan dan kelompok usaha kecil, kemudian perguruan tinggi dan mahasiswa.

Tahap monitoring dan evaluasi terhadap kewirausahaan dengan pendekatan persuatif secara informal melalui komunikasi personal dan kelompok pada setiap kelompok usaha dengan indikator kerjasama dan kekompakan, modal dan keuntungan, kualitas dan kuantitas produk, perluasan jaringan pemasaran serta keaktifan di Koperasi. Hasil monitoring dan evaluasi kewirausahaan merekomendasikan kegiatan pendampingan tentang pencatatan keuangan, bagi hasil dan modal usaha, penambahan modal dan kemitraan dengan pihak Bank syariah. Sehingga tahap manajemen pemberdayaan berikutnya yaitu memfasilitasi kelompok kewirausahaan untuk mendapat sosialisasi dan akses pinjaman modal usaha ke pihak Bank syariah.

KESIMPULAN

Model pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi memiliki tahapan (1) Proses penelitian dengan melakukan studi pendahuluan dari kajian literatur hasil



penelitian, jurnal, teori dan kasus di media massa. (2) Membuat perencanaan program pemberdayaan melalui dialog partisipatif dalam bentuk sarasehan dengan masyarakat desa untuk mengidentifikasi dan analisis masalah, potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa. Melakukan pemantapan program pemberdayaan melalui diskusi dengan para stakeholder, praktisi dan penggiat pemberdayaan kewirausahaan dan Koperasi. (3) Melakukan program pemberdayaan melalui penyuluhan, pelatihan dan studi banding tentang pembentukan dan pengembangan kelompok kewirausahaan serta Koperasi. (4) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan dengan kegiatan pendampingan, observasi ke lokasi usaha dan Koperasi, dialog partisipatif dengan pelaku kewirausahaan dan Koperasi, perluasan akses pemasaran dan menjalin kemitraan.

Model pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dapat berhasil dilaksanakan seperti: (1) Dapat menumbuhkan semangat dan kebersamaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan serta Koperasi, (2) Menjadi proses rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat dari traumatik, stigma negatif dan ketidakhormatan di masyarakat serta pesantren. (3) Mengembangkan kewirausahaan menjadi beberapa kelompok kelembagaan seperti kelompok usaha tani, kelompok peternak, dan kelompok pengrajin, kemudian Koperasi sudah berkembang menjadi Koperasi Usaha Tani yang memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat desa dan menjadi lembaga ekonomi yang terdaftar resmi dan berbadan hukum. (4) Menjalinkan akses kemitraan baik dengan pihak swasta maupun pihak Bank syariah dan pemerintah daerah untuk mendapat kredit modal usaha bagi kewirausahaan dan Koperasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kewirausahaan dan Koperasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan ditindaklanjuti penelitian lanjutan, menjadi desa binaan untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan praktikum mahasiswa.

Pemerintah desa dapat lebih memperhatikan perkembangan Koperasi dan kelompok kewirausahaan yang di miliki masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha khususnya bagi generasi muda supaya tidak meninggalkan desa dengan memberikan bantuan dana, memfasilitasi program pemberdayaan, pendampingan dan kemitraan serta permodalan baik dengan swasta, pemerintah daerah, wakil rakyat dan lembaga lainnya.

Pengurus Koperasi dan kewirausahaan secara aktif mensosialisaikan dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat lainnya khususnya para generasi muda untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota dan pengurus supaya lebih meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa.



Pihak pemerintah daerah dan wakil rakyat harus lebih memberikan perhatian berupa dukungan kebijakan program pemberdayaan dan pendampingan, bantuan modal dan akses pemasaran kepada desa yang memiliki potensi ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi yang berbasis dialogis, partisipatif, dan berkelanjutan dapat menjadi percontohan dan pionir bagi proses pemberdayaan di masyarakat daerah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebijakan dan dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar sebagai bentuk kewajiban Tri Darma PT. Kami pun mengucapkan terima kasih pada pihak Pesantren, masyarakat dan pemerintah desa yang menjadi informan penelitian kami, semoga dapat terus menjalin kerjasama mendukung pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal SEPA* 7(2): 102 – 109
- Ardiana, I.D.K.R., Brahmayanti, I.A., & Subaedi. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12(1): 42 – 55
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. 2006. Participatory action research. *Journal Epidemiol Community Health* 60(10): 854 – 857
- Christens, B.D. 2012. Targeting empowerment in community development: a community psychology approach to enhancing local power and well-being. *Community Development Journal* 47(4): 538 – 554
- Gemina, D., Samsuri., & Kusuma, I.C. 2013. Keunggulan Bersaing Koperasi Berkaitan dengan Penerapan Intellectual Capital, Manajemen Keanggotaan, dan Partisipasi Anggota. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan* 15(2): 191 – 2014
- Gruidla, J., & Husteddeb, J. 2015. Towards a robust democracy: the core competencies critical to community developers. *Journal Community Development* 46(3): 279 – 293
- Harun, R., & Ardianto, E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kajian Ulang dan Teori Kritis*. Rajawali Pers. Jakarta.



- Handoko, W., Sulaiman, A.I., & Akbar, A.A.S. 2014. Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Bendungan Matenggeng Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 17(2): 141 – 152
- Hasim., & Remiswal. 2009. *Community Development Berbasis Ekosistem: Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*. Diadit Media. Jakarta.
- Hubeis, A.V. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press. Bogor.
- Hutasuhut, A.D. 2001. Manajemen Koperasi menuju Kewirausahaan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 1(1): 1 – 11
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat :Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi dan Minat/Permerhati Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press. Surakarta.
- McIntyre, A. 2008. *Participatory Action Research*. Hellenic College. SAGE Publications. Maryland US.
- Mikkelsen, B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Penerjemah: Matheos Nalle. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Nurcholis, H., Milwan, T., & Warsono, H. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Nugrianti, O., & Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Desa. *Jurnal Kebijakan Publik* 4(1): 87 – 92
- Nurbudiyani, I. 2013. Model Pembelajaran Kewirausahaan dengan Media Koperasi Sekolah di SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen. *Jurnal Pendidikan Vokasi* 3(1): 53 – 67
- Nurman, A., & Ratnawulan. 2006. *Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa: Pengalaman Eksperimen Desentralisasi Kabupaten Bandung*. Inisitif. Bandung.
- Pama, P.G., & Ganesha. 2014. Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian sebagai Prime Mover Pembangunan Kawasan Daerah Penyangga Pembangunan (DPP) Destinasi Wisata Kintamani Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(1): 380 – 393
- Popple, K., & Quinney, A. 2002. Theory and Practice of Community Development: A Case Study From The United Kingdom. *Journal of the Community Development Society* 33(1): 71 – 85
- Prijono, O.S. 1996. Organisasi Non Pemerintah (NGOs): Peran dan Pemberdayaannya. Onny. S. Priyono & A.M.W Pranaka (penyunting), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Centre of Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta.
- Rangkuti, P.A. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*. IPB Press. Bogor.
- Reason, P., & Bradbury, H. (ed). 2008. *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. Sage Publications. California.
- Rinawati, R. 2006. Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif. *Mediator Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(2): 175 – 184



- Riosa, M., & Lachapelle, P. 2015. Community development and democratic practice: pas de deux ordistinct and different?. *Journal of Community Development* 46(3): 190 – 197
- Sahakian, M.D., & Dunan, C. 2014. The social and solidarity economy towards greater 'sustainability': learning across contexts and cultures, from Geneva to Manila. *Community Development Journal* 50(3): 403 – 417
- Samah, A.A & Aref, F. 2009. Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. *World Rural Observations* 1(2): 63 – 68
- Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Suarditha, I.K.R. 2008. Analisis Ciri Kewirausahaan dan Prilaku Pengurus Koperasi Terhadap Keberhasilan Usaha pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kota Jakarta Timur. *Wicaksana Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 17(2): 196 – 207
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.
- Sulaiman, A.I., Lubis, J., Susanto, D., & Purnaningsih, N. 2016a. Karakteristik, Aspirasi, dan Media Informasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan di Kota Banjar Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19(1): 69 – 82
- Sugito, T., & Sabiq, A. 2016b. Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migrant. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(2): 233 – 252
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Tattersall, A. 2015. The global spread of community organizing: how 'Alinsky-style' community organizing travelled to Australia and what we learnt?. *Community Development Journal* 50(3): 380 – 396
- Widayanti, S. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1(1): 87 – 102
- Windiasih, R., & Soetiarto, N,A. 2002. Kajian pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif ketahanan nasional: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada
- Widodo, N., & Suradi. 2011. Profil Dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat. *Sosiokonsepsia* 16(2): 197 – 208
- Wirawan, B., & Nurdin, B.V. 2013. Kearifan Lokal untuk Kebijakan Ketahanan Pangan: Studi Kasus di Kampung Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 4(1): 45 – 56